

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL



Oleh: Sutrisna Wibawa
(Universitas Negeri Yogyakarta)

Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Pembelajaran
Bahasa dan Sastra Daerah dalam Kerangka Budaya
Yogyakarta, 8 September 2007

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL

Oleh: Sutrisna Wibawa
(Universitas Negeri Yogyakarta)

A. Latar Belakang

Dalam sejarah pengajaran bahasa daerah, seperti survei tahun 1999 (Rusyana dalam Rosidi 'ed.', 1999: 72-75), bahasa daerah diajarkan di lima belas propinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Bali, serta propinsi lain menyusul mengajarkan, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jakarta, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara Timur. Bahasa daerah yang diajarkan adalah bahasa Aceh, Gayo, Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Melayu, Rejang, Lampung, Sunda, Cirebon, Madura, Dayak Simpang, Dayak Kanayatan, Banjar, Kutai, Tombulu, Tonsawang, Mongondow, Bugis, Makasar, Mandar, Toraja, Tolaki, Muna, Wolio, dan Bali. Bahasa-bahasa daerah itu diajarkan di semua SD dan SLTP. Untuk tingkat SLTA, seperti bahasa Jawa baru diajarkan di sekolah guru dan SMU Bahasa. Untuk Propinsi Bali, bahasa Bali diajarkan sampai tingkat SMA. Demikian juga di Jawa Barat, pengajaran bahasa Sunda juga diajarkan sampai SMA.

Untuk pengajaran bahasa Jawa, dari berbagai dokumen yang ada, pengajaran bahasa Jawa telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Pada era sebelum kemerdekaan, bahasa Jawa dijadikan bahasa pengantar pendidikan dan sebagai mata pelajaran. Setelah kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 bahasa pengantar pendidikan adalah bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa dapat dijadikan bahasa pengantar di sekolah dasar pada kelas permulaan. Sebagai mata pelajaran, bahasa Jawa diajarkan di SD dan SLTP. Dari dokumen yang ada, sejak awal bahasa Jawa memang baru menjadi mata pelajaran di SD dan

SLTP. Di tingkat menengah, bahasa Jawa menjadi mata pelajaran di Sekolah Pendidikan Guru dan SMA Jurusan Bahasa. Di Perguruan Tinggi, bahasa Jawa berdiri sendiri sebagai program studi dan mata kuliah mandiri pada jurusan terkait.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang merupakan implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi, memberikan secerah harapan untuk pembelajarn bahasa daerah, karena dalam kurikulum itu memberi peluang pengajaran bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal. Pada periode sebelumnya, pembelajaran bahasa daerah belum mendapat tempat yang pasti, sehingga daerah satu dan daerah yang lain berbeda-beda perlakuannya, tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah.

Dengan pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang merupakan implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi, memberikan secerah harapan untuk pembelajarn bahasa daerah, karena dalam kurikulum itu memberi peluang pengajaran bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal. Pada semua jenjang dan jenis pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK), struktur kurikulumnya terdapat muatan lokal. Seperti dijelaskan dalam KTSP (Depdiknas, 2006) muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional. Lingkup isi/jenis muatan lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan

daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.

Penentuan mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal akan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah dan sekolah itu sendiri. Untuk Propinsi DIY dan Jawa Tengah, muatan lokal diisi mata pelajaran bahasa Jawa, mudah-mudahan di Jawa Timur juga mengikuti DIY dan Jawa Tengah ini. Demikian juga untuk Jawa Barat, muatan lokal diisi mata pelajaran bahasa Sunda.

Setelah bahasa daerah diajarkan di sekolah dari SD sampai dengan sekolah menengah, tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengimplementasikan mata pelajaran bahasa daerah tersebut sebagai mata pelajaran yang bermakna dan menarik. Kedaulatan Rakyat edisi Senin, 18 Juli 2005 memuat berita bahwa mulai tahun ajaran 2005-2006 di DIY, bahasa Jawa akan dijadikan Mulok di SMA dan SMK. Dalam berita itu, ada pernyataan yang menarik dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta, yaitu melalui pelajaran bahasa Jawa akan lebih mengangkat nilai *adi luhung* yang ada dalam tata kehidupan Jawa, seperti toleransi, kasih sayang, *gotong royong*, *andhap asor*, kemanusiaan, nilai hormat, tahu berterima kasih, dan lainnya. Lewat bahasa Jawa itu pula, diharapkan akan dapat diangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa ini, khususnya di DIY yang terkait dengan bahasa Jawa. Untuk pelaksanaan dalam pembelajaran, pelajaran bahasa Jawa harus dikemas dengan baik supaya tidak membosankan, apalagi kemudian menjemukan.

Berdasarkan pernyataan di atas, hal yang mendesak untuk dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal adalah bagaimana membuat pembelajaran bahasa daerah menjadi bermakna dan menarik.

B. Arah Pengajaran Bahasa Daerah

Bahasa daerah di Indonesia, garis pembinaan dan pengembangannya tunduk pada kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.

Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dapat dirunut mulai Sumpah Pemuda 1928. Bunyi Sumpah Pemuda yang terkait dengan bahasa daerah adalah “Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia”. Dari isi Sumpah Pemuda, secara implisit diakui keberadaan bahasa daerah. Dalam Perubahan Keempat UUD 1945 Bab XIII, Pasal 32, dinyatakan (1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan (2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang dijabarkan lagi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pengembangan bahasa dan budaya daerah yang merupakan bagian dari bidang pendidikan dan kebudayaan menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

Dalam Politik Bahasa Nasional tentang kedudukan dan fungsi bahasa daerah dinyatakan bahwa di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Bali, Batak, Bugis, Jawa, Madura, Makasar, dan Sunda, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa seperti Bali, Batak, Bugis, Jawa, Madura, Makasar, dan Sunda berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977:13).

Nababan (1984) menyatakan ada empat fungsi bahasa, yaitu fungsi kebudayaan, kemasyarakatan, perorangan, dan pendidikan. Fungsi kebudayaan meliputi tiga hal, pelestarian kebudayaan, pengembangan kebudayaan, dan inventarisasi ciri-ciri kebudayaan. Fungsi kemasyarakatan meliputi ruang lingkup dan bidang pemakaian. Fungsi perorangan meliputi fungsi instrumental, kepribadian, pemecahan masalah, khayalan, dan informatif. Fungsi pendidikan meliputi fungsi integratif, instrumental, kultural, dan penalaran.

Anton Moeliono (1981: 38-39) menyatakan bahasa memiliki lima fungsi pokok, yaitu (1) fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan atau kedaerahan, (2) fungsi sebagai bahasa perhubungan luas pada taraf subnasional, nasional, atau internasional, (3) fungsi sebagai bahasa untuk tujuan khusus, (4) fungsi sebagai bahasa dalam sistem pendidikan sebagai pengantar dan objek studi, dan (5) fungsi sebagai bahasa kebudayaan di bidang seni, ilmu, dan teknologi.

Berdasarkan politik bahasa nasional dan kajian fungsi bahasa tersebut, pengajaran bahasa daerah setidaknya harus diarahkan pada tiga fungsi pokok, yaitu (1) alat komunikasi, (2) edukatif, dan (3) kultural. Fungsi alat komunikasi diarahkan agar siswa dapat menggunakan bahasa daerah secara baik dan benar untuk keperluan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya daerah untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi kultural agar dapat digali dan ditanamkan kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai upaya untuk membangun identitas dan menanamkan filter dalam menyeleksi pengaruh budaya luar.

Pada fungsi pertama, bahasa sebagai alat komunikasi yang diarahkan agar siswa dapat berbahasa daerah dengan baik dan benar, mengandung nilai kearifan lokal hormat atau *sopan santun*. Seperti diketahui bahwa dalam bahasa daerah (bahasa Jawa) berlaku penggunaan bahasa Jawa sesuai dengan *unggah-ungguh*, dan dalam *unggah-ungguh* itu terkandung nilai-nilai hormat di antara para pembicara, yaitu orang yang berbicara (O1) orang yang diajak berbicara (O2), dan orang yang dibicarakan (O3). Sebagai contoh, untuk menyatakan keadaan sedang makan, jika yang berbicara (O1) anak dan yang dibicarakan (O3) bapak, menggunakan kalimat "*Bapak, nembe dhahar*" (Bapak baru makan), jika yang sedang makan orang yang berbicara (O1) anak, menggunakan kalimat "*Kula saweg nedha*" (Saya sedang makan). Penggunaan kata *dhahar* (makan) merupakan realisasi dari rasa hormat kepada orang tua.

Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya daerah untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Pengajaran *unggah-ungguh* bahasa Jawa seperti diuraikan di depan, selain

untuk keperluan alat komunikasi juga dapat mengembangkan fungsi edukatif. Melalui *unggah-ungguh basa*, siswa dapat ditanamkan nilai-nilai sopan santun. Upaya yang lain adalah melalui berbagai karya sastra Jawa. Sastra wayang dalam bahasa Jawa misalnya, selain berfungsi sebagai *tontonan* (pertunjukan) juga berfungsi sebagai *tuntunan* (pendidikan). Melalui sastra wayang, para siswa dapat ditanamkan nilai-nilai etika, estetika, sekaligus logika. Ungkapan tradisional Jawa juga banyak mengandung nilai-nilai lokal Jawa untuk kepentingan pendidikan. Semboyan pendidikan nasional kita “*Ing ngarso sung tuladha, Ing madya mangun karsa, dan Tutwuri Handayani*” juga berasal dari ungkapan tradisional Jawa. Pendek kata, dalam khasanah bahasa dan sastra daerah banyak mengandung nilai-nilai lokal yang dapat berfungsi untuk mengembangkan fungsi edukatif, yaitu fungsi untuk pembentukan kepribadian.

Fungsi kultural diarahkan untuk menggali dan menanamkan kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai upaya untuk membangun identitas dan menanamkan filter dalam menyeleksi pengaruh budaya luar. Jika fungsi sebagai alat komunikasi dan edukatif telah terlaksana dengan baik, sebenarnya fungsi kultural akan dapat tercapai, karena fungsi kultural sesungguhnya terkait langsung dengan kedua fungsi itu. Melalui fungsi alat komunikasi dan edukatif, diharapkan telah ditanamkan nilai-nilai budaya daerah. Jika penanaman nilai-nilai budaya daerah telah berhasil, maka akan terbangun identitas budaya yang kuat, dan pada akhirnya akan dapat membendung dan memfilter pengaruh budaya luar.

C. Membuat Pembelajaran Bahasa Daerah Bermakna dan Menarik

Dalam Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang penulis menyampaikan bahwa pembelajaran bahasa Jawa hendaknya berlangsung tidak sekedar *meaning getting*, tetapi berupa proses *meaning making*, sehingga akan terjadi internalisasi nilai-nilai dalam diri siswa. Dengan pola itu, siswa tidak dijejali dengan seperangkat kaidah untuk dimengerti secara kognitif, tetapi diarahkan untuk pengembangan aspek afektif, sesuai dengan sifat bahasa Jawa itu sendiri yang penuh akan muatan afektif. Demikian juga pada bahasa

daerah lain, pola pembelajaran seperti itu akan dapat diterapkan dengan baik, karena bahasa-bahasa daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang sama, yaitu penuh akan muatan afektif.

Pendidikan afektif seperti dikemukakan oleh Good dan Brophy (1990) meliputi berbagai aspek, antara lain: emosi, nilai, kepercayaan, dan sikap. Istilah yang digunakan untuk indikator aspek afektif antara lain apresiasi, keinginan, kepuasan, minat, motivasi, dan kecintaan.

Belajar dari pelaksanaan pembelajaran muatan lokal kurikulum 1994, seperti dalam kesimpulan penelitian Suharsimi Arikunta (1996), guru sebagai pelaksana kurang memahami apa yang ditulis dalam GBPP, dan tanpa keyakinan yang penuh mereka melaksanakan saja sesuai dengan kemampuan menangkap apa yang dimaksud. Dengan apa yang tertera dalam GBPP, sesuai dengan kebiasaan mengajar sehari-hari, kebanyakan guru hanya menjelaskan saja---bukan memahami mengarah pada mencintai (salah satu aspek afektif), tetapi hanya mengetahui teori yang verbalistik (aspek kognitif saja). Tentu keadaan ini harus menjadi pengalaman yang berharga untuk pembelajaran bahasa daerah ke depan. Apalagi kurikulum yang berlaku sekarang Kurikulum KTSP, yang merupakan implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi di mana guru memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan silabus berdasarkan standar isi dan standar kelulusan.

Pola pembelajaran dengan KBK didasarkan atas pendekatan kontekstual atau *CTL (contextual teaching and learning)*. Pembelajaran kontekstual sebagai dijelaskan dalam KTSP (Depdiknas, 2006) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme (*constructivism*), bertanya (*questioning*), menemukan (*inquiry*), masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modeling*), dan penilaian sebenarnya (*authentic assessment*). Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa.

Untuk pelaksanaan pembelajaran, dapat digunakan apa yang pernah diusulkan oleh “Tim Konsultan Kurikulum Muatan Lokal” agar pengajaran muatan lokal mengarah ke pendidikan afektif. Dalam mengajarkan muatan lokal sebaiknya digunakan pendekatan “penyatukaitan diri dengan yang dipelajari” (*immerison*, mencelupkan diri ke dalamnya). Implementasi dari pendekatan ini, dalam pembelajaran bahasa daerah, siswa harus dibawa secara langsung dengan cara mencelupkan diri ke dalamnya secara utuh. Siswa diajak menggunakan bahasa daerah secara langsung untuk menulis atau mengarang, berbicara, membaca, dan menyimak. Kebiasaan guru berceramah secara panjang lebar tentang bahasa daerah perlu dihindari, yang diperlukan hanyalah penjelasan seperlunya untuk menggunakan bahasa daerah. Ketika pembelajaran berbicara misalnya, siswa secara langsung belajar berbicara (berkomunikasi dengan orang lain, berpidato, bercerita, dan sebagainya), guru tinggal membetulkan jika ada kesalahan penggunaan. Pembelajaran menulis juga demikian, siswa diajak menulis atau mengarang secara langsung (mengarang puisi, cerita pendek, cerita bebas, atau lainnya). Kita dapat mencontoh anak-anak keturunan Jawa di Suriname belajar bahasa Jawa dengan lagu-lagu Jawa. Pengalaman penulis mengamati anak-anak muda di Suriname, ternyata mereka tertarik belajar bahasa Jawa melalui lagu-lagu Jawa seperti campur sari, lagu-lagu pop Jawa, panembrama, dan karawitan. Festival lagu-lagu Jawa di Suriname mampu membangkitkan minat generasi muda keturunan Jawa di Suriname untuk belajar bahasa Jawa.

Penelitian yang pernah penulis lakukan di SMP 8 Yogyakarta pada tahun 1999, pembelajaran sastra wayang secara apresiatif dengan mengembangkan aspek-aspek menggemari, menikmati, mereaksi, dan memproduksi dapat meningkatkan penanaman nilai-nilai pendidikan budi pekerti. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan “penyatukaitan diri dengan yang dipelajari”. Siswa secara langsung diajak mencelupkan diri dalam pembelajaran sastra wayang. Siswa diajak menonton

pertunjukan wayang melalui rekaman audio-visual, rekaman audio, bacaan, dan menghadirkan tokoh-tokoh wayang serta mendiskusikannya. Minat siswa yang diungkap dari angket meningkat tajam, dari sebelum mengikuti pelajaran skor 70,3 menjadi 85,65 setelah pembelajaran selesai. Sikap siswa juga meningkat dari skor 76,9 menjadi 89,55. Hasil itu menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dan membuktikan bahwa pola pembelajaran secara apresiasitif dapat membangkitkan minat siswa untuk belajar. Model pembelajaran bahasa daerah (bahasa Jawa) dengan memanfaatkan media pertunjukan wayang kiranya dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa daerah di sekolah.

Untuk mengemas pembelajaran agar lebih menarik dan tidak membosankan, apalagi kemudian menjemukan, guru dapat memanfaatkan sarana teknologi yang ada, misalnya memanfaatkan VCD atau video berisi berbagai program bahasa, sastra, dan budaya daerah seperti wayang, berbagai upacara tradisional, lagu-lagu daerah (tembang, campur sari, karawitan), pemanfaatan program komputer, pemanfaatan internet, dan sebagainya.

Untuk membaca dan menulis aksara Jawa, Dinas Kebudayaan Propinsi DIY telah menghasilkan program komputer **hanacaraka** yang dapat digunakan untuk pembelajaran membaca dan menulis Aksara Jawa. Selain itu, beberapa *website* berbahasa daerah juga dapat digunakan untuk media pembelajaran. Situs-situs itu, antara lain:

- a. www.geocities.com/mohdsabilan/
- b. <http://home.wanadoo.nl/ed.vos/jawa/>
- c. www.familiazam.com/bahasa_jawa.htm
- f. www.seasite.niu.edu/Indonesian/jawa/unit1jawa.htm
- g. <http://jv.wikipedia.org>
- h. <http://padhang-mbulan.blogspot.com>
- i. www.jawapalac.org/subsastra.htm/
- j. <http://jonggringsaloka.org>
- k. *Basa Jawa-Wikipedia*

- l. Yayasan Sekarjagad*
- m. Hanacaraka Fateback*
- n. Sesotya Pita*
- o. Tembi*
- p. Minggu Jaya Baya*
- q. Hanacaraka*
- r. Basa Sundha-Wikipedia*

Kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung kegiatan kurikuler juga perlu digalakkan, misalnya majalah dinding yang memuat karya siswa, sanggar sastra, karawitan, dan berbagai lomba bahasa, sastra, dan kesenian daerah. Kegiatan menggunakan bahasa daerah dalam waktu-waktu khusus juga perlu digalakkan, misalnya kegiatan sehari berbahasa Jawa (hari bahasa Jawa) di beberapa sekolah di DIY perlu diperluas ke sekolah-sekolah lain. Kegiatan pemerintahan yang menerapkan kegiatan hari bahasa Jawa juga perlu didukung dan perlu diperluas ke daerah-daerah lain.

D. Simpulan

1. Pembelajaran bahasa daerah dapat menjadi salah satu mata pelajaran muatan lokal di semua jenis dan jenjang pendidikan.
2. Pembelajaran bahasa daerah setidaknya harus diarahkan pada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi alat komunikasi, edukatif, dan kultural.
3. Pembelajaran bahasa daerah harus diusahakan bermakna. Salah satu pola pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan “penyatukaitan diri dengan yang dipelajari”. Siswa harus dibawa secara langsung menggunakan bahasa daerah.
4. Sesuai dengan karakteristik KTSP, pembelajaran secara kontekstual atau *CTL* (*contextual teaching and learning*) menjadi salah satu alternatif untuk dilaksanakan. Melalui pembelajaran kontekstual, guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan.

5. Untuk mengemas pembelajaran agar lebih menarik, guru dapat memanfaatkan sarana teknologi yang ada, misalnya memanfaatkan VCD atau video berisi berbagai program bahasa, sastra, dan budaya daerah seperti wayang, berbagai upacara tradisional, lagu-lagu daerah (tembang, campur sari, karawitan), pemanfaatan program komputer, dan pemanfaatan *website* berbahasa daerah melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional RI, 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Bahan Sosialisasi*.
<http://www.depdiknas.id.org>.
- Hymes, Dell. 1972. "Models of the Interaction of Language and Social Life" dalam, J.J. Gumperz dan Hymes (ed.) *Direction in Sociolinguistic*. New York: Rinehart & Winston.
- Moeliono, Anton. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Jambatan.
- Nababan, P.W.J. 1991. *Sociolinguistik suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwo. Bambang Kaswanti. 2003. "Pengajaran Bahasa Nusantara di Indonesia. Jakarta: Makalah Seminar Hari Bahasa Ibu Internasional.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1977. *Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Seri Penyuluhan 3.
- Rosidi, Ajip (editor). 1999. *Bahasa Nusantara suatu Pemetaan Awal*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- Sayuti, Suminto A. 2003. "Muatan Lokal dalam Penyelenggaraan Pendidikan". Bukittinggi: Makalah Kongres Kebudayaan

